



**BUPATI BONDOWOSO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO  
NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);  
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang...

6

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4078);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan...

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

24. Peraturan...

6



24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
27. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Penyediaan Air Minum;

32. Peraturan...



42. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 Nomor 8 Seri E);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 21);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 3);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO  
dan  
BUPATI BONDOWOSO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1...



Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp. 1.861.114.791.191,07
2. Belanja Daerah	Rp. 1.890.378.486.747,63
Surplus/ (Defisit)	(Rp. 29.263.695.556,56)
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan	Rp. 32.263.695.556,56
b. Pengeluaran	Rp. 3.000.000.000,00
Pembiayaan netto	Rp. 29.263.695.556,56
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :
  - a. Pendapatan Asli Daerah  
    jumlah Rp. 186.418.196.551,77
  - b. Dana Perimbangan jumlah Rp. 1.316.234.333.200,00
  - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah jumlah Rp. 358.462.261.439,30
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pendapatan:
  - a. Pajak Daerah jumlah Rp. 31.628.328.621,00
  - b. Retribusi Daerah jumlah Rp. 20.427.158.394,00
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan jumlah Rp. 3.805.729.059,48
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah jumlah Rp. 130.556.980.477,29
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
  - a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak jumlah Rp. 76.254.429.200,00
  - b. Dana Alokasi Umum jumlah Rp. 910.319.122.000,00
  - c. Dana Alokasi Khusus jumlah Rp. 329.660.782.000,00

(4) Lain-lain...

- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- |  |     |                    |
|--|-----|--------------------|
| a. Hibah sejumlah  | Rp. | 66.373.000.000,00  |
| b. Dana darurat sejumlah   | Rp. | 0,00               |
| c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sejumlah                                | Rp. | 70.112.330.439,30  |
| d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah                                | Rp. | 221.976.931.000,00 |
| e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah | Rp. | 0,00               |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari:
- |                                    |     |                      |
|------------------------------------|-----|----------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung sejumlah | Rp. | 1.207.909.941.258,63 |
| b. Belanja Langsung sejumlah       | Rp. | 682.468.545.489,00   |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis belanja:
- |                                      |     |                    |
|--------------------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah          | Rp. | 798.119.107.886,04 |
| b. Belanja Bunga sejumlah            | Rp. | 0,00               |
| c. Belanja Subsidi sejumlah          | Rp. | 1.183.163.800,00   |
| d. Belanja Hibah sejumlah            | Rp. | 87.356.876.000,00  |
| e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah   | Rp. | 17.071.500.000,00  |
| f. Belanja Bagi Hasil sejumlah       | Rp. | 0,00               |
| g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah | Rp. | 302.304.865.422,00 |
| h. Belanja Tidak Terduga sejumlah    | Rp. | 1.874.428.150,59   |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- |                                     |     |                    |
|-------------------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah         | Rp. | 35.103.640.119,00  |
| b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah | Rp. | 427.699.079.656,00 |
| c. Belanja Modal sejumlah           | Rp. | 219.665.825.714,00 |

Pasal 4...



Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 15 Desember 2017

**BUPATI BONDOWOSO,**

  
 **AMIN SAID HUSNI** 

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 15 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,**

  
**HIDAYAT**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017 NOMOR 18

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR: 407-  
18/2017





**PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO**  
**RINGKASAN APBD**  
TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	<b>PENDAPATAN</b>	1.861.114.791.191,07
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	186.418.196.551,77
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	31.628.328.621,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	20.427.158.394,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.805.729.059,48
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	130.556.980.477,29
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	1.316.234.333.200,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	76.254.429.200,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	910.319.122.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	329.660.782.000,00
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	358.462.261.439,30
1.3.1	Pendapatan Hibah	66.373.000.000,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	70.112.330.439,30
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	221.976.931.000,00
2	<b>BELANJA</b>	1.890.378.486.747,63
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1.207.909.941.258,63
2.1.1	Belanja Pegawai	798.119.107.886,04
2.1.3	Belanja Subsidi	1.183.163.800,00
2.1.4	Belanja Hibah	87.356.876.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	17.071.500.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	302.304.865.422,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.874.428.150,59
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	682.468.545.489,00
2.2.1	Belanja Pegawai	35.103.640.119,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	427.699.079.656,00
2.2.3	Belanja Modal	219.665.825.714,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(29.263.695.556,56)
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	32.263.695.556,56
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	12.263.695.556,56
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	20.000.000.000,00
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	3.000.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	29.263.695.556,56
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00

BONDOWOSO, 15 Desember 2017

**BUPATI BONDOWOSO**

**AMIN SAID HUSNI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO**  
**RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**

TAHUN ANGGARAN 2018

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
1	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>	136.202.456.670,00	628.833.158.100,00	464.526.451.770,00	1.093.359.609.870,00
1.01	<b>Pendidikan</b>	0,00	521.973.438.700,00	91.673.754.800,00	613.647.193.500,00
1.01 . 1.01.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0,00	521.973.438.700,00	91.673.754.800,00	613.647.193.500,00
1.02	<b>Kesehatan</b>	136.061.522.670,00	70.235.000.200,00	218.210.482.670,00	288.445.482.870,00
1.02 . 1.02.01	DINAS KESEHATAN	47.221.522.670,00	47.220.337.500,00	107.650.274.670,00	154.870.612.170,00
1.02 . 1.02.02	RUMAH SAKIT UMUM DR. H. KOESNADI	88.840.000.000,00	23.014.662.700,00	110.560.208.000,00	133.574.870.700,00
1.03	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	140.934.000,00	16.989.540.300,00	131.093.688.000,00	148.083.228.300,00
1.03 . 1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	140.934.000,00	16.989.540.300,00	131.093.688.000,00	148.083.228.300,00
1.04	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>	0,00	5.172.939.000,00	9.922.780.000,00	15.095.719.000,00
1.04 . 1.04.01	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	5.172.939.000,00	9.922.780.000,00	15.095.719.000,00
1.05	<b>Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</b>	0,00	11.747.705.500,00	10.448.176.300,00	22.195.881.800,00
1.05 . 1.05.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	2.366.856.800,00	2.384.700.000,00	4.751.556.800,00
1.05 . 1.05.02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0,00	7.419.817.100,00	5.007.876.300,00	12.427.693.400,00
1.05 . 1.05.03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	1.961.031.600,00	3.055.600.000,00	5.016.631.600,00
1.06	<b>Sosial</b>	0,00	2.714.534.400,00	3.177.570.000,00	5.892.104.400,00
1.06 . 1.06.01	DINAS SOSIAL	0,00	2.714.534.400,00	3.177.570.000,00	5.892.104.400,00
2	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>	5.548.466.036,36	47.442.184.300,00	81.117.306.300,00	128.559.490.600,00
2.01	<b>Tenaga Kerja</b>	0,00	0,00	3.860.000.000,00	3.860.000.000,00
2.01 . 2.12.01	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	0,00	0,00	3.860.000.000,00	3.860.000.000,00
2.02	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>	0,00	8.739.854.500,00	8.740.248.000,00	17.480.102.500,00
2.02 . 2.02.01	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	8.739.854.500,00	8.740.248.000,00	17.480.102.500,00
2.03	<b>Pangan</b>	54.574.948,36	2.695.158.300,00	1.357.755.000,00	4.052.913.300,00
2.03 . 2.03.01	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	54.574.948,36	2.695.158.300,00	1.357.755.000,00	4.052.913.300,00
2.04	<b>Pertanahan</b>	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.04 . 1.04.01	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00

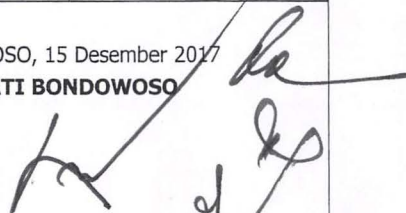
KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
2.04 . 2.12.01	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2.05	<b>Lingkungan Hidup</b>	3.056.640.500,00	15.877.341.100,00	28.320.200.000,00	44.197.541.100,00
2.05 . 2.05.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	3.056.640.500,00	15.877.341.100,00	28.320.200.000,00	44.197.541.100,00
2.06	<b>Administrasi Kependudukan dan Capil</b>	0,00	2.361.103.800,00	3.305.758.000,00	5.666.861.800,00
2.06 . 2.06.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	2.361.103.800,00	3.305.758.000,00	5.666.861.800,00
2.07	<b>Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	0,00	2.690.042.200,00	4.589.928.100,00	7.279.970.300,00
2.07 . 2.07.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	2.690.042.200,00	4.589.928.100,00	7.279.970.300,00
2.08	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>	0,00	0,00	1.629.622.000,00	1.629.622.000,00
2.08 . 2.02.01	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	0,00	1.629.622.000,00	1.629.622.000,00
2.09	<b>Perhubungan</b>	0,00	0,00	5.805.500.000,00	5.805.500.000,00
2.09 . 2.05.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	0,00	0,00	5.805.500.000,00	5.805.500.000,00
2.10	<b>Komunikasi dan Informatika</b>	186.200.000,00	2.058.348.800,00	6.469.714.000,00	8.528.062.800,00
2.10 . 2.10.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	186.200.000,00	2.058.348.800,00	6.469.714.000,00	8.528.062.800,00
2.11	<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>	2.091.690.588,00	6.646.332.500,00	10.322.900.000,00	16.969.232.500,00
2.11 . 2.11.01	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2.091.690.588,00	6.646.332.500,00	10.322.900.000,00	16.969.232.500,00
2.12	<b>Penanaman Modal</b>	159.360.000,00	3.816.742.600,00	1.189.851.200,00	5.006.593.800,00
2.12 . 2.12.01	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	159.360.000,00	3.816.742.600,00	1.189.851.200,00	5.006.593.800,00
2.13	<b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>	0,00	0,00	1.845.000.000,00	1.845.000.000,00
2.13 . 3.02.01	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	0,00	0,00	1.845.000.000,00	1.845.000.000,00
2.14	<b>Statistik</b>	0,00	0,00	225.000.000,00	225.000.000,00
2.14 . 2.10.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	0,00	225.000.000,00	225.000.000,00
2.15	<b>Persandian</b>	0,00	0,00	101.575.000,00	101.575.000,00
2.15 . 2.10.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	0,00	101.575.000,00	101.575.000,00
2.16	<b>Kebudayaan</b>	0,00	0,00	1.721.000.000,00	1.721.000.000,00
2.16 . 1.01.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0,00	0,00	1.721.000.000,00	1.721.000.000,00
2.17	<b>Perpustakaan</b>	0,00	2.557.260.500,00	1.283.255.000,00	3.840.515.500,00
2.17 . 2.17.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0,00	2.557.260.500,00	1.283.255.000,00	3.840.515.500,00
2.18	<b>Kearsipan</b>	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00
2.18 . 2.17.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00
3	<b>Urusan Pilihan</b>	495.216.164,93	18.662.001.600,00	44.638.521.000,00	63.300.522.600,00
3.01	<b>Kelautan dan Perikanan</b>	0,00	0,00	2.339.950.000,00	2.339.950.000,00
3.01 . 2.03.01	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	0,00	0,00	2.339.950.000,00	2.339.950.000,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
4.01 . 4.01.26	KECAMATAN JAMBESARI DARUSSHOLAH	0,00	1.697.123.900,00	444.239.000,00	2.141.362.900,00
4.01 . 4.01.27	KECAMATAN BOTOLINGGO	0,00	1.613.248.700,00	441.798.000,00	2.055.046.700,00
4.02	<b>Pengawasan</b>	0,00	3.475.468.200,00	5.385.750.000,00	8.861.218.200,00
4.02 . 4.02.01	INSPEKTORAT	0,00	3.475.468.200,00	5.385.750.000,00	8.861.218.200,00
4.03	<b>Perencanaan</b>	0,00	3.363.937.000,00	7.353.894.500,00	10.717.831.500,00
4.03 . 4.03.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0,00	3.363.937.000,00	7.353.894.500,00	10.717.831.500,00
4.04	<b>Keuangan</b>	1.718.868.652.319,78	419.126.414.108,63	12.584.986.800,00	431.711.400.908,63
4.04 . 4.04.01	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.675.434.594.639,30	415.240.936.029,63	6.689.003.000,00	421.929.939.029,63
4.04 . 4.04.02	BADAN PENDAPATAN DAERAH	43.434.057.680,48	3.885.478.079,00	5.895.983.800,00	9.781.461.879,00
4.05	<b>Kepegawaian</b>	0,00	4.368.589.200,00	3.418.909.700,00	7.787.498.900,00
4.05 . 4.05.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	0,00	4.368.589.200,00	3.418.909.700,00	7.787.498.900,00
4.06	<b>Pendidikan dan Pelatihan</b>	0,00	0,00	1.350.472.000,00	1.350.472.000,00
4.06 . 4.05.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	0,00	0,00	1.350.472.000,00	1.350.472.000,00
4.07	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>	0,00	0,00	450.000.000,00	450.000.000,00
4.07 . 4.03.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0,00	0,00	450.000.000,00	450.000.000,00
<b>JUMLAH</b>		1.861.114.791.191,07	1.207.909.941.258,63	682.468.545.489,00	1.890.378.486.747,63

**SURPLUS / (DEFISIT)** (29.263.695.556,56)

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PEMBIAYAAN			SILPA TAB
		PENERIMAAN	PENGELUARAN	PEMBIAYAAN NETTO	
1	2	3	4	5	6
4	<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang</b>	32.263.695.556,56	3.000.000.000,00	29.263.695.556,56	
4.04	<b>Keuangan</b>	32.263.695.556,56	3.000.000.000,00	29.263.695.556,56	
4.04 . 4.04.01	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	32.263.695.556,56	3.000.000.000,00	29.263.695.556,56	

**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN** 0,00

BONDOWOSO, 15 Desember 2017  
**BUPATI BONDOWOSO**  
  
**AMIN SAID HUSNI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO**  
**RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN**  
 TAHUN ANGGARAN 2018

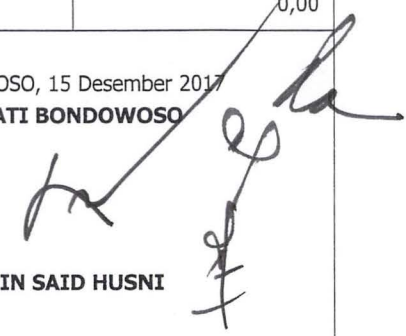
KODE	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
1.01.01	<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>	0,00	521.973.438.700,00	93.394.754.800,00	615.368.193.500,00
1.01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan	0,00	521.973.438.700,00	91.673.754.800,00	613.647.193.500,00
1.16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan	0,00	0,00	1.721.000.000,00	1.721.000.000,00
1.02.01	<b>DINAS KESEHATAN</b>	47.221.522.670,00	47.220.337.500,00	107.650.274.670,00	154.870.612.170,00
1.02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	47.221.522.670,00	47.220.337.500,00	107.650.274.670,00	154.870.612.170,00
1.02.02	<b>RUMAH SAKIT UMUM DR. H. KOESNADI</b>	88.840.000.000,00	23.014.662.700,00	110.560.208.000,00	133.574.870.700,00
1.02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	88.840.000.000,00	23.014.662.700,00	110.560.208.000,00	133.574.870.700,00
1.03.01	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	140.934.000,00	16.989.540.300,00	131.093.688.000,00	148.083.228.300,00
1.03	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	140.934.000,00	16.989.540.300,00	131.093.688.000,00	148.083.228.300,00
1.04.01	<b>DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	0,00	5.172.939.000,00	9.962.780.000,00	15.135.719.000,00
1.04	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	5.172.939.000,00	9.922.780.000,00	15.095.719.000,00
1.04	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pertanahan	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00
1.05.01	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	0,00	2.366.856.800,00	2.384.700.000,00	4.751.556.800,00
1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	2.366.856.800,00	2.384.700.000,00	4.751.556.800,00
1.05.02	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>	0,00	7.419.817.100,00	5.007.876.300,00	12.427.693.400,00
1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	7.419.817.100,00	5.007.876.300,00	12.427.693.400,00
1.05.03	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>	0,00	1.961.031.600,00	3.055.600.000,00	5.016.631.600,00
1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	1.961.031.600,00	3.055.600.000,00	5.016.631.600,00
1.06.01	<b>DINAS SOSIAL</b>	0,00	2.714.534.400,00	3.177.570.000,00	5.892.104.400,00
1.06	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial	0,00	2.714.534.400,00	3.177.570.000,00	5.892.104.400,00
2.02.01	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA</b>	0,00	8.739.854.500,00	10.369.870.000,00	19.109.724.500,00
2.02	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	8.739.854.500,00	8.740.248.000,00	17.480.102.500,00
2.08	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	1.629.622.000,00	1.629.622.000,00

KODE	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
2.03.01	<b>DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN</b>	54.574.948,36	2.695.158.300,00	3.697.705.000,00	6.392.863.300,00
2.03	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan	54.574.948,36	2.695.158.300,00	1.357.755.000,00	4.052.913.300,00
3.01	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	2.339.950.000,00	2.339.950.000,00
2.05.01	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN</b>	3.056.640.500,00	15.877.341.100,00	34.125.700.000,00	50.003.041.100,00
2.05	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	3.056.640.500,00	15.877.341.100,00	28.320.200.000,00	44.197.541.100,00
2.09	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan	0,00	0,00	5.805.500.000,00	5.805.500.000,00
2.06.01	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	0,00	2.361.103.800,00	3.305.758.000,00	5.666.861.800,00
2.06	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil	0,00	2.361.103.800,00	3.305.758.000,00	5.666.861.800,00
2.07.01	<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	0,00	2.690.042.200,00	4.589.928.100,00	7.279.970.300,00
2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	2.690.042.200,00	4.589.928.100,00	7.279.970.300,00
2.10.01	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	186.200.000,00	2.058.348.800,00	6.796.289.000,00	8.854.637.800,00
2.10	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika	186.200.000,00	2.058.348.800,00	6.469.714.000,00	8.528.062.800,00
2.14	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Statistik	0,00	0,00	225.000.000,00	225.000.000,00
2.15	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Persandian	0,00	0,00	101.575.000,00	101.575.000,00
2.11.01	<b>DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>	2.091.690.588,00	6.646.332.500,00	22.516.400.000,00	29.162.732.500,00
2.11	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.091.690.588,00	6.646.332.500,00	10.322.900.000,00	16.969.232.500,00
3.06	Urusan Pilihan Perdagangan	0,00	0,00	6.786.000.000,00	6.786.000.000,00
3.07	Urusan Pilihan Perindustrian	0,00	0,00	5.407.500.000,00	5.407.500.000,00
2.12.01	<b>DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA</b>	159.360.000,00	3.816.742.600,00	5.097.851.200,00	8.914.593.800,00
2.01	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja	0,00	0,00	3.860.000.000,00	3.860.000.000,00
2.04	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pertanahan	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2.12	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal	159.360.000,00	3.816.742.600,00	1.189.851.200,00	5.006.593.800,00
3.08	Urusan Pilihan Transmigrasi	0,00	0,00	38.000.000,00	38.000.000,00
2.17.01	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>	0,00	2.557.260.500,00	1.583.255.000,00	4.140.515.500,00
2.17	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan	0,00	2.557.260.500,00	1.283.255.000,00	3.840.515.500,00
2.18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00
3.02.01	<b>DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>	139.495.000,00	2.705.829.400,00	7.347.580.000,00	10.053.409.400,00
2.13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga	0,00	0,00	1.845.000.000,00	1.845.000.000,00
3.02	Urusan Pilihan Pariwisata	139.495.000,00	2.705.829.400,00	5.502.580.000,00	8.208.409.400,00
3.03.01	<b>DINAS PERTANIAN</b>	355.721.164,93	15.956.172.200,00	24.564.491.000,00	40.520.663.200,00
3.03	Urusan Pilihan Pertanian	355.721.164,93	15.956.172.200,00	24.564.491.000,00	40.520.663.200,00

KODE	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PEMBIAYAAN			SILPA TAB
		PENERIMAAN	PENGELUARAN	PEMBIAYAAN NETTO	
1	2	3	4	5	6
4.04.01	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan	32.263.695.556,56	3.000.000.000,00	29.263.695.556,56	
4.04		32.263.695.556,56	3.000.000.000,00	29.263.695.556,56	
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN</b>					0,00

BONDOWOSO, 15 Desember 2017

**BUPATI BONDOWOSO**




**AMIN SAID HUSNI**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah  <b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	3.000.000.000,00 29.263.695.556,56	

BONDOWOSO, 15 Desember 2017

**BUPATI BONDOWOSO**



**AMIN SAID HUSNI**





**PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,**  
**PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
 TAHUN ANGGARAN 2018


Urusan Pemerintahan : 4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan  
 Organisasi : 4.04.01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
 Sub Unit Organisasi : 4.04.01.02 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.04.4.04.01.00.00.4	<b>PENDAPATAN</b>	1.674.696.594.639,30	
4.04.4.04.01.00.00.4.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	1.316.234.333.200,00	
4.04.4.04.01.00.00.4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	76.254.429.200,00	DJPK TA 2018 PMK No. 43/PMK.07/2017 DJPK TA 2018
4.04.4.04.01.00.00.4.2.2	Dana Alokasi Umum	910.319.122.000,00	
4.04.4.04.01.00.00.4.2.3	Dana Alokasi Khusus	329.660.782.000,00	
4.04.4.04.01.00.00.4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	358.462.261.439,30	
4.04.4.04.01.00.00.4.3.1	Pendapatan Hibah	66.373.000.000,00	
4.04.4.04.01.00.00.4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	70.112.330.439,30	Surat Gubernur No. 970/5946/2024/2017
4.04.4.04.01.00.00.4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	221.976.931.000,00	DJPK TA 2018
4.04.4.04.01.00.00.5	<b>BELANJA</b>	409.790.833.372,59	
4.04.4.04.01.00.00.5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	409.790.833.372,59	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.3	Belanja Subsidi	1.183.163.800,00	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.4	Belanja Hibah	87.356.876.000,00	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	17.071.500.000,00	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	302.304.865.422,00	
4.04.4.04.01.00.00.5.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.874.428.150,59	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	1.264.905.761.266,71	
4.04.4.04.01.00.00.6	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
4.04.4.04.01.00.00.6.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	32.263.695.556,56	
4.04.4.04.01.00.00.6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	12.263.695.556,56	
4.04.4.04.01.00.00.6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	20.000.000.000,00	
4.04.4.04.01.00.00.6.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	3.000.000.000,00	

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
4.05 . 4.05.01 . 33 . 01	Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	79.800.000,00	22.500.000,00	0,00	102.300.000,00
4.05 . 4.05.01 . 33 . 02	Penataan Sistem Administrasi Penerbitan Karis, Karsu, Karpeg, Taspen dan Tanda Pengenal	2.300.000,00	75.335.000,00	0,00	77.635.000,00
4.05 . 4.05.01 . 33 . 03	Seleksi dan Pengusulan Tanda Kehormatan PNS	3.150.000,00	21.850.000,00	0,00	25.000.000,00
4.05 . 4.05.01 . 33 . 04	Penegakan Disiplin PNS	87.300.000,00	13.555.000,00	0,00	100.855.000,00
4.05 . 4.05.01 . 33 . 05	Sosialisasi Peraturan Kepegawaian	25.750.000,00	228.292.000,00	0,00	254.042.000,00
4.05 . 4.05.01 . 33 . 06	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3.975.000,00	12.258.000,00	125.525.000,00	141.758.000,00
4.06	<b>Pendidikan dan Pelatihan</b>	35.787.500,00	1.314.684.500,00	0,00	1.350.472.000,00
4.06 . 4.05.01	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	35.787.500,00	1.314.684.500,00	0,00	1.350.472.000,00
4.06 . 4.05.01 . 15	<i>Program Pendidikan Kedinasan</i>	35.787.500,00	1.314.684.500,00	0,00	1.350.472.000,00
4.06 . 4.05.01 . 15 . 01	Pendidikan dan pelatihan teknis	0,00	136.000.000,00	0,00	136.000.000,00
4.06 . 4.05.01 . 15 . 02	Pendidikan penjenjangan struktural	0,00	104.772.000,00	0,00	104.772.000,00
4.06 . 4.05.01 . 15 . 03	Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional, dan Kepemimpinan	20.287.500,00	591.712.500,00	0,00	612.000.000,00
4.06 . 4.05.01 . 15 . 04	Penyelenggaraan Diklat Teknis, Tugas dan fungsi bagi PNS Daerah	6.675.000,00	278.325.000,00	0,00	285.000.000,00
4.06 . 4.05.01 . 15 . 05	Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	8.825.000,00	203.875.000,00	0,00	212.700.000,00
4.07	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>	50.209.000,00	349.791.000,00	50.000.000,00	450.000.000,00
4.07 . 4.03.01	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	50.209.000,00	349.791.000,00	50.000.000,00	450.000.000,00
4.07 . 4.03.01 . 15	<i>Program Penelitian dan Pengembangan</i>	50.209.000,00	349.791.000,00	50.000.000,00	450.000.000,00
4.07 . 4.03.01 . 15 . 01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Penelitian dan Pengembangan	49.459.000,00	100.541.000,00	0,00	150.000.000,00
4.07 . 4.03.01 . 15 . 02	Fasilitas Dewan Riset (DRD)	250.000,00	149.750.000,00	0,00	150.000.000,00
4.07 . 4.03.01 . 15 . 03	Kajian Penelitian dan Pengembangan	500.000,00	99.500.000,00	50.000.000,00	150.000.000,00
<b>JUMLAH</b>		35.103.640.119,00	427.699.079.656,00	219.665.825.714,00	682.468.545.489,00

BONDOWOSO, 15 Desember 2017

**BUPATI BONDOWOSO**



**AMIN SAID HUSNI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO**  
**REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN**  
**URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA**  
 TAHUN ANGGARAN 2018

KODE	URAIAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG		BELANJA LANGSUNG			JUMLAH
		PEGAWAI	NON PEGAWAI	PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7
01	<b>PELAYANAN UMUM</b>	107.935.270.986,04	409.790.833.372,59	11.568.942.919,00	82.698.948.450,00	6.372.419.050,00	618.366.414.777,63
01 2 03	Pangan	2.695.158.300,00	0,00	193.400.000,00	1.132.155.000,00	32.200.000,00	4.052.913.300,00
01 2 10	Komunikasi dan Informatika	2.058.348.800,00	0,00	346.510.000,00	5.212.187.000,00	911.017.000,00	8.528.062.800,00
01 2 14	Statistik	0,00	0,00	22.800.000,00	202.200.000,00	0,00	225.000.000,00
01 2 15	Persandian	0,00	0,00	4.050.000,00	97.525.000,00	0,00	101.575.000,00
01 2 18	Kearsipan	0,00	0,00	62.500.000,00	207.500.000,00	30.000.000,00	300.000.000,00
01 4 01	Administrasi Pemerintahan	82.638.188.750,00	0,00	4.060.120.119,00	53.725.744.250,00	3.856.389.050,00	144.280.442.169,00
01 4 02	Pengawasan	3.475.468.200,00	0,00	1.139.054.000,00	3.980.646.000,00	266.050.000,00	8.861.218.200,00
01 4 03	Perencanaan	3.363.937.000,00	0,00	2.315.780.000,00	4.757.164.500,00	280.950.000,00	10.717.831.500,00
01 4 04	Keuangan	9.335.580.736,04	409.790.833.372,59	2.325.201.100,00	9.528.962.700,00	730.823.000,00	431.711.400.908,63
01 4 05	Kepegawaian	4.368.589.200,00	0,00	1.013.531.200,00	2.190.388.500,00	214.990.000,00	7.787.498.900,00
01 4 06	Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	35.787.500,00	1.314.684.500,00	0,00	1.350.472.000,00
01 4 07	Penelitian dan Pengembangan	0,00	0,00	50.209.000,00	349.791.000,00	50.000.000,00	450.000.000,00
03	<b>KETERTIBAN DAN KEAMANAN</b>	11.747.705.500,00	0,00	3.064.299.000,00	6.413.701.300,00	970.176.000,00	22.195.881.800,00
03 1 05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	11.747.705.500,00	0,00	3.064.299.000,00	6.413.701.300,00	970.176.000,00	22.195.881.800,00
04	<b>EKONOMI</b>	29.109.289.500,00	0,00	3.992.896.400,00	49.064.919.440,00	11.846.304.460,00	94.013.409.800,00
04 2 01	Tenaga Kerja	0,00	0,00	141.750.000,00	2.753.757.500,00	964.492.500,00	3.860.000.000,00
04 2 07	Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.690.042.200,00	0,00	449.231.400,00	4.070.447.740,00	70.248.960,00	7.279.970.300,00
04 2 09	Perhubungan	0,00	0,00	1.876.687.000,00	3.094.043.000,00	834.770.000,00	5.805.500.000,00
04 2 11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6.646.332.500,00	0,00	206.200.000,00	9.827.150.000,00	289.550.000,00	16.969.232.500,00
04 2 12	Penanaman Modal	3.816.742.600,00	0,00	186.013.000,00	883.394.200,00	120.444.000,00	5.006.593.800,00
04 3 01	Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	82.500.000,00	1.829.450.000,00	428.000.000,00	2.339.950.000,00
04 3 03	Pertanian	15.956.172.200,00	0,00	750.140.000,00	21.031.041.000,00	2.783.310.000,00	40.520.663.200,00
04 3 06	Perdagangan	0,00	0,00	99.525.000,00	1.416.475.000,00	5.270.000.000,00	6.786.000.000,00
04 3 07	Perindustrian	0,00	0,00	199.250.000,00	4.122.761.000,00	1.085.489.000,00	5.407.500.000,00
04 3 08	Transmigrasi	0,00	0,00	1.600.000,00	36.400.000,00	0,00	38.000.000,00

KODE	URAIAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG		BELANJA LANGSUNG			JUMLAH
		PEGAWAI	NON PEGAWAI	PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7
05	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>	15.877.341.100,00	0,00	660.635.000,00	21.514.382.000,00	6.195.183.000,00	44.247.541.100,00
05 2 04	Pertanahan	0,00	0,00	18.300.000,00	31.700.000,00	0,00	50.000.000,00
05 2 05	Lingkungan Hidup	15.877.341.100,00	0,00	642.335.000,00	21.482.682.000,00	6.195.183.000,00	44.197.541.100,00
06	<b>PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM</b>	22.162.479.300,00	0,00	1.294.770.000,00	48.611.205.000,00	91.110.493.000,00	163.178.947.300,00
06 1 03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	16.989.540.300,00	0,00	1.013.120.000,00	39.464.455.000,00	90.616.113.000,00	148.083.228.300,00
06 1 04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	5.172.939.000,00	0,00	281.650.000,00	9.146.750.000,00	494.380.000,00	15.095.719.000,00
07	<b>KESEHATAN</b>	70.235.000.200,00	0,00	9.969.455.000,00	146.475.839.266,00	63.394.810.404,00	290.075.104.870,00
07 1 02	Kesehatan	70.235.000.200,00	0,00	9.759.305.000,00	145.085.367.266,00	63.365.810.404,00	288.445.482.870,00
07 2 08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	210.150.000,00	1.390.472.000,00	29.000.000,00	1.629.622.000,00
08	<b>PARIWISATA DAN BUDAYA</b>	2.705.829.400,00	0,00	115.012.000,00	4.230.288.000,00	2.878.280.000,00	9.929.409.400,00
08 2 16	Kebudayaan	0,00	0,00	52.550.000,00	1.141.450.000,00	527.000.000,00	1.721.000.000,00
08 3 02	Pariwisata	2.705.829.400,00	0,00	62.462.000,00	3.088.838.000,00	2.351.280.000,00	8.208.409.400,00
10	<b>PENDIDIKAN</b>	524.530.699.200,00	0,00	3.452.091.300,00	54.731.185.200,00	36.618.733.300,00	619.332.709.000,00
10 1 01	Pendidikan	521.973.438.700,00	0,00	3.313.054.800,00	52.372.212.700,00	35.988.487.300,00	613.647.193.500,00
10 2 13	Kepemudaan dan Olah Raga	0,00	0,00	37.100.000,00	1.460.800.000,00	347.100.000,00	1.845.000.000,00
10 2 17	Perpustakaan	2.557.260.500,00	0,00	101.936.500,00	898.172.500,00	283.146.000,00	3.840.515.500,00
11	<b>PERLINDUNGAN SOSIAL</b>	13.815.492.700,00	0,00	985.538.500,00	13.958.611.000,00	279.426.500,00	29.039.068.700,00
11 1 06	Sosial	2.714.534.400,00	0,00	204.149.000,00	2.953.671.000,00	19.750.000,00	5.892.104.400,00
11 2 02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.739.854.500,00	0,00	440.410.000,00	8.167.111.500,00	132.726.500,00	17.480.102.500,00
11 2 06	Administrasi Kependudukan dan Cakil	2.361.103.800,00	0,00	340.979.500,00	2.837.828.500,00	126.950.000,00	5.666.861.800,00
		798.119.107.886,04	409.790.833.372,59	35.103.640.119,00	427.699.079.656,00	219.665.825.714,00	1.890.378.486.747,63

BONDOWOSO, 15 Desember 2017

**BUPATI BONDOWOSO**



**AMIN SAID HUSNI**



**PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO**  
**DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

GOLONGAN/RUANG	ESELON				NON ESELON		JUMLAH
	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV/e	0	0	0	0	0	0	0
Golongan IV/d	1	0	0	0	0	0	1
Golongan IV/c	24	0	0	0	34	0	58
Golongan IV/b	8	0	0	0	1481	0	1489
Golongan IV/a	1	0	0	0	1386	0	1387
<b>JUMLAH GOLONGAN IV</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2901</b>	<b>0</b>	<b>2935</b>
Golongan III/d	0	35	284	0	581	381	1281
Golongan III/c	0	2	206	0	603	403	1214
Golongan III/b	0	0	41	0	740	410	1191
Golongan III/a	0	0	0	0	0	937	937
<b>JUMLAH GOLONGAN III</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>531</b>	<b>0</b>	<b>1924</b>	<b>2131</b>	<b>4623</b>
Golongan II/d	0	0	0	0	0	227	227
Golongan II/c	0	0	0	0	0	870	870
Golongan II/b	0	0	0	0	0	987	987
Golongan II/a	0	0	0	0	0	420	420
<b>JUMLAH GOLONGAN II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2504</b>	<b>2504</b>
Golongan I/d	0	0	0	0	0	91	91
Golongan I/c	0	0	0	0	0	244	244
Golongan I/b	0	0	0	0	0	44	44
Golongan I/a	0	0	0	0	0	10	10
<b>JUMLAH GOLONGAN I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>389</b>	<b>389</b>
<b>TOTAL</b>	<b>34</b>	<b>37</b>	<b>531</b>	<b>0</b>	<b>4825</b>	<b>5024</b>	<b>10451</b>

Bondowoso, 15 Desember 2017  
BUPATI BONDOWOSO

AMIN SAID HUSNI



**PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO**  
**REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN**  
TAHUN ANGGARAN 2018

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>	17.635.577.800,00	255.436.157.266,00	191.454.716.704,00	464.526.451.770,00
1.01	<b>Pendidikan</b>	3.313.054.800,00	52.372.212.700,00	35.988.487.300,00	91.673.754.800,00
1.01 . 1.01.01	<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>	3.313.054.800,00	52.372.212.700,00	35.988.487.300,00	91.673.754.800,00
1.01 . 1.01.01 . 07	<b>Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran</b>	1.654.054.800,00	1.277.400.000,00	1.265.000.000,00	4.196.454.800,00
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01	Penyediaan Administrasi Perkantoran	1.654.054.800,00	1.028.580.000,00	0,00	2.682.634.800,00
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	248.820.000,00	1.265.000.000,00	1.513.820.000,00
1.01 . 1.01.01 . 08	<b>Program Perencanaan dan Pelaporan</b>	26.165.000,00	47.535.000,00	0,00	73.700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01	Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	25.200.000,00	47.000.000,00	0,00	72.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02	Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan dan Aset	965.000,00	535.000,00	0,00	1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15	<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>	23.200.000,00	809.000.000,00	350.200.000,00	1.182.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	17.400.000,00	464.800.000,00	50.200.000,00	532.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69	Pembinaan Forum PAUD Non Formal	5.800.000,00	144.200.000,00	0,00	150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73	Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan Anak Usia Dini	0,00	200.000.000,00	300.000.000,00	500.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18	<b>Program Pendidikan Non Formal</b>	687.085.000,00	631.222.500,00	0,00	1.318.307.500,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14	Pembuatan Percontohan Pendidikan Luar Sekolah	5.035.000,00	84.965.000,00	0,00	90.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18	Pengembangan pendidikan keaksaraan, Kesetaraan dan Ketrampilan	653.400.000,00	419.907.500,00	0,00	1.073.307.500,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 19	Penguatan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa	27.000.000,00	78.000.000,00	0,00	105.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20	Penyelenggaraan Olahraga dalam rangka Hardiknas	1.650.000,00	48.350.000,00	0,00	50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20	<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>	90.150.000,00	1.057.300.000,00	0,00	1.147.450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01	Pelaksanaan Sertifikasi pendidik	70.800.000,00	29.200.000,00	0,00	100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03	pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	5.700.000,00	541.750.000,00	0,00	547.450.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 15	Seleksi Guru Berprestasi	1.900.000,00	98.100.000,00	0,00	100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19	Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	2.000.000,00	48.000.000,00	0,00	50.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 22	Workshop Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional Guru melalui Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)	6.650.000,00	243.350.000,00	0,00	250.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 24	Workshop Penguatan Manajemen Kepala Sekolah	3.100.000,00	96.900.000,00	0,00	100.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 25	<b>Program Pendidikan Dasar dan Pengembangan Budi Pekerti Luhur</b>	641.850.000,00	47.465.305.200,00	32.923.287.300,00	81.030.442.500,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1.01 . 1.01.01 . 25 . 01	Pembangunan sarana dan prasarana Pendidikan Dasar	0,00	0,00	12.069.620.000,00	12.069.620.000,00
1.01 . 1.01.01 . 25 . 02	Pengadaan Sarana dan prasarana Pendidikan Dasar	0,00	0,00	5.461.380.000,00	5.461.380.000,00
1.01 . 1.01.01 . 25 . 03	Penyelenggaraan akreditasi Pendidikan Dasar	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 25 . 04	Pelaksanaan Ujian Nasional Pendidikan Dasar	525.600.000,00	1.240.330.600,00	274.084.400,00	2.040.015.000,00
1.01 . 1.01.01 . 25 . 05	Baca Tulis Al Qur'an Melalui Muatan Lokal Disetiap Jenjang Pendidikan	1.500.000,00	148.500.000,00	0,00	150.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 25 . 06	Gerakan Kembali Sekolah	95.100.000,00	45.047.897.100,00	15.118.202.900,00	60.261.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 25 . 07	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa Pendidikan Dasar	19.650.000,00	988.577.500,00	0,00	1.008.227.500,00
1.01 . 1.01.01 . 26	<b>Program Fasilitas Pendidikan</b>	190.550.000,00	1.084.450.000,00	1.450.000.000,00	2.725.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 26 . 01	Pembangunan Gedung Lembaga Pendidikan	0,00	0,00	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 26 . 02	Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu	43.250.000,00	856.750.000,00	0,00	900.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 26 . 03	Penyelenggaraan Dewan Pendidikan dan PGRI	7.800.000,00	167.200.000,00	0,00	175.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 26 . 04	Penyusunan Data Base Infrastruktur	139.500.000,00	60.500.000,00	0,00	200.000.000,00
1.02	<b>Kesehatan</b>	9.759.305.000,00	145.085.367.266,00	63.365.810.404,00	218.210.482.670,00
1.02 . 1.02.01	<b>DINAS KESEHATAN</b>	3.259.305.000,00	77.745.367.266,00	26.645.602.404,00	107.650.274.670,00
1.02 . 1.02.01 . 07	<b>Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran</b>	2.070.600.000,00	1.864.580.000,00	21.000.000,00	3.956.180.000,00
1.02 . 1.02.01 . 07 . 01	Penyediaan Administrasi Perkantoran	2.070.600.000,00	1.489.900.000,00	0,00	3.560.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 07 . 02	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	374.680.000,00	21.000.000,00	395.680.000,00
1.02 . 1.02.01 . 08	<b>Program Perencanaan dan Pelaporan</b>	4.000.000,00	1.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 08 . 01	Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	2.500.000,00	1.000.000,00	0,00	3.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 08 . 02	Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan dan Aset	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15	<b>Program Obat dan Perbekalan Kesehatan</b>	30.300.000,00	4.253.752.000,00	0,00	4.284.052.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08	Pengadaan dan Pendistribusian Obat dan Perbekalan Kesehatan	18.300.000,00	3.977.752.000,00	0,00	3.996.052.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09	Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan	12.000.000,00	276.000.000,00	0,00	288.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	444.975.000,00	21.426.336.000,00	24.000.000,00	21.895.311.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 24	Peningkatan dan pemeliharaan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia	21.700.000,00	284.475.000,00	0,00	306.175.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 25	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26	Pemanfaatan BOK Puskesmas dan Kabupaten	337.700.000,00	16.131.271.000,00	0,00	16.468.971.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 27	Pemanfaatan Dana Jampersal	80.400.000,00	3.346.460.000,00	0,00	3.426.860.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 28	Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	0,00	501.990.000,00	24.000.000,00	525.990.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29	Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga	5.175.000,00	962.140.000,00	0,00	967.315.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25	<b>Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya</b>	0,00	187.843.000,00	19.789.197.000,00	19.977.040.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 46	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana prasarana puskesmas dan jaringannya	0,00	22.843.000,00	18.704.197.000,00	18.727.040.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25 . 47	Penyediaan/Pemeliharaan Sarana pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat yang Terkena Penyakit Akibat Dampak Konsumsi rokok dan penyakit lainnya	0,00	165.000.000,00	1.085.000.000,00	1.250.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 37	<b>Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>	3.000.000,00	848.412.000,00	0,00	851.412.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO**  
**DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

GOLONGAN/RUANG	ESELON				NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV/e	0	0	0	0	0	0	0
Golongan IV/d	0	1	0	0	2	0	3
Golongan IV/c	0	21	0	0	30	1	52
Golongan IV/b	0	7	60	6	1199	42	1314
Golongan IV/a	0	1	82	41	940	26	1090
<b>JUMLAH GOLONGAN IV</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>142</b>	<b>47</b>	<b>2171</b>	<b>69</b>	<b>2459</b>
Golongan III/d	0	0	24	273	476	39	812
Golongan III/c	0	0	1	187	505	68	761
Golongan III/b	0	0	0	61	687	209	957
Golongan III/a	0	0	0	8	899	297	1204
<b>JUMLAH GOLONGAN III</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>529</b>	<b>2567</b>	<b>613</b>	<b>3734</b>
Golongan II/d	0	0	0	0	97	179	276
Golongan II/c	0	0	0	0	256	915	1171
Golongan II/b	0	0	0	0	154	365	519
Golongan II/a	0	0	0	0	24	441	465
<b>JUMLAH GOLONGAN II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>531</b>	<b>1900</b>	<b>2431</b>
Golongan I/d	0	0	0	0	2	47	49
Golongan I/c	0	0	0	0	0	200	200
Golongan I/b	0	0	0	0	1	28	29
Golongan I/a	0	0	0	0	3	7	10
<b>JUMLAH GOLONGAN I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>282</b>	<b>288</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>167</b>	<b>576</b>	<b>5275</b>	<b>2864</b>	<b>8912</b>

Bondowoso, 15 Desember 2017  
 BUPATI BONDOWOSO

AMIN SAID HUSNI



Lampiran VII  
Peraturan Daerah  
Nomor 18 Tahun 2017  
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Tahun Anggaran 2018



**PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO**  
**DAFTAR PIUTANG DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

No.	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Jumlah Piutang Sampai Dengan Tahun 2016	Perkiraan Penambahan Tahun 2017	Perkiraan Pengurangan Tahun 2017	Perkiraan Saldo Akhir Tahun 2017
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6
<b>1</b>	<b>Piutang Pajak</b>	<b>1998 s.d 2016</b>	<b>4.157.671.068,20</b>	<b>21.290.150.000,00</b>	<b>16.787.547.897,00</b>	<b>8.660.273.171,20</b>
	- Pajak Reklame	2012 s.d 2016	227.716.663,00	535.650.000,00	472.738.180,00	290.628.483,00
	- Pajak Penerangan Jalan	1998 s.d 2010	1.101.408.541,20	9.580.000.000,00	5.637.460.193,00	5.043.948.348,20
	- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2014, 2015, 2016	2.701.080,00	12.000.000,00	9.050.873,00	5.650.207,00
	- Pajak Restoran	2013 s.d 2016	1.105.000,00	731.500.000,00	598.823.002,00	133.781.998,00
	- Pajak Hiburan	2013,2014	509.000,00	31.000.000,00	18.628.000,00	12.881.000,00
	- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	2014	2.785.926.435,00	8.500.000.000,00	8.749.464.366,00	2.536.462.069,00
	- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2014	38.304.349,00	1.900.000.000,00	1.301.383.283,00	636.921.066,00
<b>2</b>	<b>Piutang Retribusi</b>	<b>2000 s.d 2016</b>	<b>1.126.711.512,70</b>	<b>690.517.320,00</b>	<b>206.581.215,00</b>	<b>1.610.647.617,70</b>
	- Sewa Tanah Trotoar	2010	1.688.400,00	0,00	0,00	1.688.400,00
	- Sewa Kios Terminal	2000, 2006, 2011, 2016	5.282.200,00	0,00	0,00	5.282.200,00
	- Sewa Kios Pasar	2006 s.d 2016	218.216.000,00	364.097.000,00	170.358.225,00	411.954.775,00
	- Sewa Toko Pasar	2010 s.d 2016	112.913.375,00	0,00	0,00	112.913.375,00
	- Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	2014, 2015	118.939.311,00	186.000.000,00	0,00	304.939.311,00
	- Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	2010, 2016	669.563.026,70	81.012.620,00	0,00	750.575.646,70
	- Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dan Ijin Gangguan (HO)	2016	109.200,00	59.407.700,00	36.222.990,00	23.293.910,00

No.	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Jumlah Piutang Sampai Dengan Tahun 2016	Perkiraan Penambahan Tahun 2017	Perkiraan Pengurangan Tahun 2017	Perkiraan Saldo Akhir Tahun 2017
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6
<b>3</b>	<b>Piutang Lain-Lain PAD</b>	<b>2016</b>	<b>126.385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.385,00</b>
	- Piutang Kompensasi Kelebihan Pembayaran Pajak	2016	126.385,00	0,00	0,00	126.385,00
<b>4</b>	<b>Piutang Dana Bagi Hasil</b>	<b>2016</b>	<b>19.215.738.979,00</b>	<b>67.309.702.468,00</b>	<b>37.525.322.486,00</b>	<b>49.000.118.961,00</b>
	- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	2016	4.093.783.072,00	17.951.825.900,00	9.302.154.981,00	12.743.453.991,00
	- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	2016	1.761.258.311,00	9.451.444.594,00	4.750.550.583,00	6.462.152.322,00
	- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	2016	4.724.063.952,00	19.669.206.260,00	9.330.043.370,00	15.063.226.842,00
	- Pajak Air Permukaan (P-AP)	2016	72.004.673,00	244.786.184,00	128.987.079,00	187.803.778,00
	- Pajak Rokok	2016	8.564.628.971,00	19.992.439.530,00	14.013.586.473,00	14.543.482.028,00
	- Sumbangan Pihak Ketiga (SP III)	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Beban Dibayar Dimuka</b>	<b>2016</b>	<b>4.300.083,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300.083,33</b>
<b>6</b>	<b>Piutang Lain-Lain</b>	<b>2000 s.d 2016</b>	<b>10.780.653.623,96</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.786.983.783,96</b>
	- Klaim Jamkesda	2016	80.565.924,00	0,00	0,00	80.565.924,00
	- Klaim BPJS	2014, 2016	9.863.437.930,00	0,00	0,00	9.863.437.930,00
	- Klaim Pelayanan Kesehatan Kepada Pihak III Lainnya	2015, 2016	498.159.708,00	0,00	0,00	498.159.708,00
	- Bagi Hasil Parkir		0,00	0,00	0,00	0,00
	- Piutang Sewa Prodi D-III Keperawatan Unibo	2016	48.750.000,00	0,00	0,00	48.750.000,00
	- Piutang Bantuan Keuangan Parpol	2014	96.640.604,00	0,00	0,00	96.640.604,00
	- Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah	2013 s.d 2016	156.700.000,00	0,00	0,00	156.700.000,00
	- Piutang Denda Keterlambatan Proyek	2011	33.990.040,00	0,00	13.669.840,00	20.320.200,00
	- Kredit Sepeda Motor Pegawai	Nopember 2003	2.409.417,96	20.000.000,00	0,00	22.409.417,96
<b>7</b>	<b>Piutang Yang Timbul Dari Perjanjian/Perikatan</b>	<b>2000 s.d 2008</b>	<b>9.726.063.888,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.726.063.888,86</b>
	- Kredit Sapi Kereman	2000 s.d 2003	1.284.462.657,00	0,00	0,00	1.284.462.657,00

No.	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Jumlah Piutang Sampai Dengan Tahun 2016	Perkiraan Penambahan Tahun 2017	Perkiraan Pengurangan Tahun 2017	Perkiraan Saldo Akhir Tahun 2017
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6
	- Kredit Usaha Kecil Menengah (Feeder Point)	2002 s.d 2007	2.365.814.118,92	0,00	0,00	2.365.814.118,92
	- Kredit Pembelian Gabah Petani	2002 s.d 2007	1.389.129.336,94	0,00	0,00	1.389.129.336,94
	- Kredit Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Februari 2003 s.d Agustus 2008	4.668.548.526,00	0,00	0,00	4.668.548.526,00
	- Kredit Penguatan Modal Usaha Perikanan	Maret 2005	18.109.250,00	0,00	0,00	18.109.250,00
	- Kredit Bantuan TKI	Juli 2007	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>		<b>45.011.265.541,05</b>	<b>89.310.369.788,00</b>	<b>54.519.451.598,00</b>	<b>79.788.513.891,05</b>

Bondowoso, 15 Desember 2017  
**BUPATI BONDOWOSO**

  
**AMIN SAID HUSNI**



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO  
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Tahun Penyeretaan Modal	Nama Badan / Lembaga / Pihak Ketiga	Dasar hukum penyeretaan modal (investasi) daerah	Bentuk penyeretaan modal (investasi) daerah	Jumlah penyeretaan modal (investasi) daerah	Jumlah modal yang telah disertakan sampai tahun anggaran lalu	Penyeretaan modal tahun ini	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini	Sisa modal yang belum disertakan	Hasil penyeretaan modal (investasi) daerah tahun ini	Jumlah modal (investasi) yang akan diterima kembali tahun ini	Jumlah Sisa Modal (investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7+8	10 = 6-9	11	12	13 = 9-12
1	2011	PDAM	Perda No. 3 Tahun 2015	Penyeretaan Modal Pemerintah Daerah	15.000.000.000,00	7.845.000.000,00	0,00	7.845.000.000,00	7.155.000.000,00	0,00	0,00	7.845.000.000,00
2	2011	BANK JATIM	Perda No. 10 Tahun 2011	Saham	25.000.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00	4.500.000.000,00	20.500.000.000,00	3.805.729.059,48	0,00	4.500.000.000,00
3	2017	PT. BONDOWOSO GEMILANG	Perda No. 1 Tahun 2017	Penyeretaan Modal Pemerintah Daerah	11.847.397.900,00	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	8.847.397.900,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00
<b>Jumlah</b>					<b>51.847.397.900,00</b>	<b>12.345.000.000,00</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>15.345.000.000,00</b>	<b>36.502.397.900,00</b>	<b>3.805.729.059,48</b>	<b>-</b>	<b>15.345.000.000,00</b>

Bondowoso, 15 Desember 2017  
BUPATI BONDOWOSO

AMIN SAID HUSNI



**PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO**  
**DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

No.	Jenis aset tetap daerah	Saldo pada akhir tahun 2016	Perkiraan penambahan tahun 2017	Perkiraan pengurangan tahun 2017	Perkiraan saldo pada akhir tahun 2017
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
<b>1</b>	<b>Tanah</b>	<b>314.023.433.144,00</b>	<b>6.016.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.039.633.144,00</b>
	Tanah	314.023.433.144,00	6.016.200.000,00	0,00	320.039.633.144,00
<b>2</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>426.228.273.799,25</b>	<b>48.609.792.329,00</b>	<b>12.339.883.460,00</b>	<b>462.498.182.668,25</b>
	Alat-alat Berat	10.902.396.220,00	890.500.000,00	2.000.000,00	11.790.896.220,00
	Alat-alat Angkutan	88.426.930.330,00	7.915.773.500,00	19.969.400,00	96.322.734.430,00
	Alat Bengkel	5.012.188.327,00	42.141.000,00	0,00	5.054.329.327,00
	Alat Pertanian dan Peternakan	5.442.073.856,00		0,00	5.442.073.856,00
	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	131.611.913.286,26	6.364.495.600,00	1.512.325.846,00	136.464.083.040,26
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	14.855.149.034,00	2.611.031.800,00	670.711.731,00	16.795.469.103,00
	Alat Ukur	1.969.806.956,00	10.334.000,00	0,00	1.980.140.956,00
	Alat-alat Kedokteran	107.171.601.171,73	26.515.001.606,00	10.125.176.483,00	123.561.426.294,73
	Alat Laboratorium	59.492.418.330,26	4.113.676.500,00	0,00	63.606.094.830,26
	Alat Keamanan	1.343.796.288,00	146.838.323,00	9.700.000,00	1.480.934.611,00
<b>3</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>772.686.370.016,21</b>	<b>96.097.940.349,00</b>	<b>5.743.689.500,00</b>	<b>863.040.620.865,21</b>
	Bangunan Gedung	764.522.154.282,21	96.097.940.349,00	5.743.689.500,00	854.876.405.131,21
	Bangunan Monumen	8.164.215.734,00	0,00	0,00	8.164.215.734,00
<b>4</b>	<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>1.578.618.423.131,14</b>	<b>226.918.374.535,00</b>	<b>22.495.045.175,00</b>	<b>1.783.041.752.491,14</b>
	Jalan dan Jembatan	692.588.322.151,64	116.243.562.190,00	3.449.659.425,00	805.382.224.916,64
	Bangunan Air (Irigasi)	833.310.301.915,50	107.345.349.525,00	19.017.577.250,00	921.638.074.190,50

No.	Jenis aset tetap daerah	Saldo pada akhir tahun 2016	Perkiraan penambahan tahun 2017	Perkiraan pengurangan tahun 2017	Perkiraan saldo pada akhir tahun 2017
	Instalasi	10.490.630.480,00	407.400.000,00	2.140.000,00	10.895.890.480,00
	Jaringan	42.229.168.584,00	2.922.062.820,00	25.668.500,00	45.125.562.904,00
<b>5</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>21.711.779.951,46</b>	<b>274.380.000,00</b>	<b>38.520.000,00</b>	<b>21.947.639.951,46</b>
	Buku dan Perpustakaan	19.352.368.056,46	250.230.000,00	14.670.000,00	19.587.928.056,46
	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	1.620.533.064,00	24.150.000,00	23.850.000,00	1.620.833.064,00
	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	738.878.831,00	0,00	0,00	738.878.831,00
	<b>Jumlah</b>	<b>3.113.268.280.042,06</b>	<b>377.916.687.213,00</b>	<b>40.617.138.135,00</b>	<b>3.450.567.829.120,06</b>

Bondowoso, 15 Desember 2017  
 BUPATI BONDOWOSO

AMIN SAID HUSNI



**PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO**  
**DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

No.	Jenis Aset Lainnya	Saldo Pada Akhir Tahun 2016	Perkiraan Penambahan Tahun 2017	Perkiraan Pengurangan Tahun 2017	Perkiraan Saldo Pada Akhir Tahun 2017
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
<b>1</b>	<b>Tagihan Jangka Panjang</b>	<b>2.567.498.209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.567.498.209,00</b>
	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Daerah	2.567.498.209,00	0,00	0,00	2.567.498.209,00
<b>2</b>	<b>Kemitraan dengan pihak ketiga</b>	<b>151.408.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.408.140,00</b>
<b>3</b>	<b>Aset tak berwujud</b>	<b>3.875.268.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.875.268.300,00</b>
	<b>Dinas Pendidikan</b>	<b>542.590.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542.590.000,00</b>
	Software e-content Media Pendidikan	458.640.000,00	0,00	0,00	458.640.000,00
	Software Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	83.950.000,00	0,00	0,00	83.950.000,00
	<b>Dinas Kesehatan</b>	<b>107.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.500.000,00</b>
	Aplikasi Persediaan Obat Berbasis Web	99.500.000,00	0,00	0,00	99.500.000,00
	Aplikasi Persediaan Barang	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
	Software Antrian Pasien	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	<b>Dinas Pengairan</b>	<b>185.658.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.658.000,00</b>
	Aplikasi Pemetaan Aset Irigasi Kabupaten Bondowoso	185.658.000,00	0,00	0,00	185.658.000,00
	<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>21.092.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.092.500,00</b>
	Software SIMPEDAL	21.092.500,00	0,00	0,00	21.092.500,00
	<b>Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil</b>	<b>298.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.750.000,00</b>
	Software Update SIAK-AFIS	36.000.000,00	0,00	0,00	36.000.000,00
	Software SIAK Desa/Kelurahan	199.300.000,00	0,00	0,00	199.300.000,00
	Software Sistem Aplikasi Arsip Elektronik	55.950.000,00	0,00	0,00	55.950.000,00
	Website	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
	<b>Bagian Hukum</b>	<b>14.080.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.080.000,00</b>
	Software	14.080.000,00	0,00	0,00	14.080.000,00
	<b>Bagian Pemerintahan</b>	<b>44.719.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.719.000,00</b>
	Website Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	44.719.000,00	0,00	0,00	44.719.000,00
	<b>Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan</b>	<b>1.088.651.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088.651.000,00</b>




No.	Jenis Aset Lainnya	Saldo Pada Akhir Tahun 2016	Perkiraan Penambahan Tahun 2017	Perkiraan Pengurangan Tahun 2017	Perkiraan Saldo Pada Akhir Tahun 2017
	Software Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah (Simpada)	98.000.000,00	0,00	0,00	98.000.000,00
	Software Windows Server	10.650.000,00	0,00	0,00	10.650.000,00
	Software PBB	297.865.000,00	0,00	0,00	297.865.000,00
	Customisasi Software Simpada	49.700.000,00	0,00	0,00	49.700.000,00
	Software Sismiop	49.636.000,00	0,00	0,00	49.636.000,00
	Software Simd@k	40.500.000,00	0,00	0,00	40.500.000,00
	Aplikasi Penyetoran PBB P2	190.300.000,00	0,00	0,00	190.300.000,00
	Software Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa	104.500.000,00	0,00	0,00	104.500.000,00
	Software Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah PBB dan BPHTB (Mobile Sismop)	98.450.000,00	0,00	0,00	98.450.000,00
	Aplikasi Registrasi PBB dan BPHTB	149.050.000,00	0,00	0,00	149.050.000,00
	<b>Inspektorat</b>	<b>39.622.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.622.000,00</b>
	Software SIMPEG	39.622.000,00	0,00	0,00	39.622.000,00
	<b>Badan Kepegawaian Daerah</b>	<b>575.697.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575.697.300,00</b>
	Software SIMPEG	70.609.500,00	0,00	0,00	70.609.500,00
	Website	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00
	Software Mesin Absensi	59.199.800,00	0,00	0,00	59.199.800,00
	Software Simpeg Webbase	84.737.500,00	0,00	0,00	84.737.500,00
	Software Kenaikan Pangkat	43.662.500,00	0,00	0,00	43.662.500,00
	Software SMS Gateway	38.500.000,00	0,00	0,00	38.500.000,00
	Software E-Dokumen	41.800.000,00	0,00	0,00	41.800.000,00
	Software E-Absensi Berbasis Web	110.880.000,00	0,00	0,00	110.880.000,00
	Software Aplikasi E-Absensi Berbasis Android	38.280.000,00	0,00	0,00	38.280.000,00
	Sistem Aplikasi Absensi	84.128.000,00	0,00	0,00	84.128.000,00
	<b>Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu</b>	<b>301.883.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.883.500,00</b>
	Software Aplikasi Sistem Informasi Perijinan	103.955.000,00	0,00	0,00	103.955.000,00
	Software	197.928.500,00	0,00	0,00	197.928.500,00
	<b>Kantor Perpustakaan dan Arsip</b>	<b>201.746.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.746.000,00</b>
	Software Kearsipan	49.143.000,00	0,00	0,00	49.143.000,00
	Website Sistem Perpustakaan Online Berbasis E-Book	152.603.000,00	0,00	0,00	152.603.000,00
	<b>Dinas Pariwisata, Pemuda, Olahraga &amp; Perhubungan</b>	<b>49.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.500.000,00</b>
	Website Pariwisata	49.500.000,00	0,00	0,00	49.500.000,00
	<b>Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan</b>	<b>403.779.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403.779.000,00</b>
	Software dan Updating Sistem Manajemen UMKM	183.000.000,00	0,00	0,00	183.000.000,00
	Software Database Koperasi	50.229.000,00	0,00	0,00	50.229.000,00
	Sistem Informasi Manajemen UMKM	170.550.000,00	0,00	0,00	170.550.000,00
<b>4</b>	<b>Amortisasi Aset Tak Berwujud</b>	<b>(1.804.284.740,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.804.284.740,00)</b>
<b>5</b>	<b>Aset lain-lain</b>	<b>39.069.982.361,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.069.982.361,92</b>



Lamp 8

No.	Jenis Aset Lainnya	Saldo Pada Akhir Tahun 2016	Perkiraan Penambahan Tahun 2017	Perkiraan Pengurangan Tahun 2017	Perkiraan Saldo Pada Akhir Tahun 2017
	<b>Aset yang dihentikan penggunaannya</b>	<b>20.467.079.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.467.079.360,00</b>
	Tanah	133.551.840,00	0,00	0,00	133.551.840,00
	Alat-alat Angkutan	132.333.000,00	0,00	0,00	132.333.000,00
	Alat Bengkel	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alat Pertanian dan Peternakan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	9.088.189.377,00	0,00	0,00	9.088.189.377,00
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	415.447.404,00	0,00	0,00	415.447.404,00
	Alat-alat Kedokteran	1.997.778.779,00	0,00	0,00	1.997.778.779,00
	Alat Laboratorium	2.271.839.040,00	0,00	0,00	2.271.839.040,00
	Bangunan Gedung	117.073.000,00	0,00	0,00	117.073.000,00
	Jalan dan Jembatan	1.621.350.508,00	0,00	0,00	1.621.350.508,00
	Bangunan Air (Irigasi)	3.807.087.112,00	0,00	0,00	3.807.087.112,00
	Software	882.429.300,00	0,00	0,00	882.429.300,00
	<b>Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Yang Dihentikan Penggunaannya</b>	<b>(1.468.826.198,08)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.468.826.198,08)</b>
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.468.826.198,08)	0,00	0,00	(1.468.826.198,08)
	<b>Aset yang akan diserahkan kepada pihak ketiga</b>	<b>20.071.729.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.071.729.200,00</b>
	<b>Dinas Bina Marga</b>	<b>20.071.729.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.071.729.200,00</b>
	Realisasi belanja modal jalan tahun anggaran 2013 pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya yang diusulkan untuk dihapus karena jalan tersebut merupakan jalan desa dan jalan lingkungan.	13.907.419.500,00	0,00	0,00	13.907.419.500,00
	Realisasi belanja modal Bangunan Air (Irigasi) tahun anggaran 2013 pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya yang status tanahnya adalah tanah milik masyarakat dan pengelolaannya telah diserahkan kepada Himpunan Pengguna Air Minum (HIPAM) setempat.	5.965.813.700,00	0,00	0,00	5.965.813.700,00
	Realisasi Kegiatan rehabilitasi makam Raden Bagus Asra Kertonegoro (Kironggo) sebagai hibah untuk pemeliharaan bangunan bersejarah.	198.496.000,00	0,00	0,00	198.496.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>43.859.872.270,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.859.872.270,92</b>

Bondowoso, 15 Desember 2017  
BUPATI BONDOWOSO

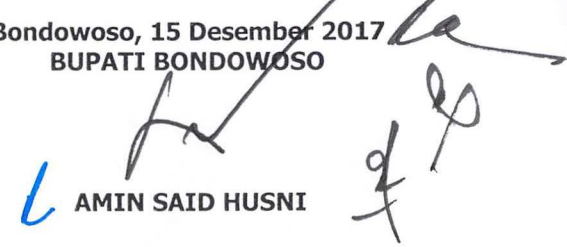
  
  
 AMIN SAID HUSNI



**PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO**  
**DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN**  
**DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

No.	Kode Kegiatan	Judul kegiatan	Jumlah Tahun Awal Penganggaran (Rp)		Jumlah Realisasi sampai dengan akhir TA 2016 (Rp)	Jumlah Anggaran TAHUN 2017		Jumlah Realisasi sampai dengan akhir TA 2017 (Rp)	Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan dalam tahun ini (Rp) TA 2018	
			APBD INDUK TA 2016	PERUBAHAN APBD TA 2016		APBD INDUK TA 2017	PERUBAHAN APBD TA 2017		INDUK	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>NIHIL</b>										
Jumlah			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bondowoso, 15 Desember 2017  
BUPATI BONDOWOSO

  
AMIN SAID HUSNI

Lampiran XI  
 Peraturan Daerah  
 Nomor 18 Tahun 2017  
 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
 Tahun Anggaran 2018



**PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO**  
**DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN**  
**DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

No.	Kode	Judul kegiatan	Jumlah Anggaran TAHUN 2017		Jumlah Realisasi s.d akhir TA 2017	Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan dalam tahun ini (Rp) TA 2018	
			APBD TA 2017	PERUBAHAN APBD TA 2017		APBD	PERUBAHAN APBD
1	2	3	4	5	6	7	8
NIHIL							
<b>Jumlah</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bondowoso, 15 Desember 2017  
 BUPATI BONDOWOSO

*(Signature)*  
 AMIN SAID HUSNI

*(Signature)*





**PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO**  
**DAFTAR PINJAMAN DAERAH**

No	Sumber pinjaman daerah	Dasar Hukum Pinjaman / Obligasi	Tanggal / Tahun Perjanjian Pinjaman / Obligasi	Jumlah Pinjaman / Nilai Nominal Obligasi (Rp)	Jangka waktu pinjaman (tahun)	Persentase bunga Pinjaman %	Tujuan penggunaan pinjaman	Jumlah pembayaran tahun ini (Rp)		Jumlah sisa pembayaran (Rp)	
								Pokok Pinjaman Daerah	Bunga	Pokok Pinjaman Daerah	Bunga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Jumlah</b>											

**NIHIL**

Bondowoso, 15 Desember 2017  
BUPATI BONDOWOSO

AMIN SAID HUSNI